

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

VISI SUMSEL 2025-2029

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

- Sumsel sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, modern, Tangguh, inovatif dan adil
- Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik

MISI

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan rumah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

II. Belanja, Program APBD dan Program APBN

a. Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 yang semula sebesar Rp. 40.907.056.335,00 menjadi Rp 33.347.338.085 yang terdiri atas:

Belanja Operasi	: 33.347.338.085,00
Belanja Pegawai	: 16.777.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa	: 16.009.655.335,00
Belanja Modal	: 559.882.750,00
Belanja Modal Peralatan	
Mesin	: 300.000.000,00
Belanja Modal Gedung	
dan Bangunan	: 259.882.750,00

Pada Tahun 2025 Dinas Kelautan dan perikanan Memiliki 6 Program dan 21 Kegiatan serta 45 Sub Kegiatan:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- 2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2) Program dan Anggaran APBD

Total pagu Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 33.347.338.085,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
----	-------------------------------	---------------

		(Rp)
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.251.548.085,00
	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	643.000.000,00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	476.000.000,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.000.000,00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	140.000.000,00
	ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.285.798.000,00
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.777.800.000,00
	5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.480.998.000,00
	6 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	27.000.000,00
	iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.000.000,00
	7 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.000.000,00
	v Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.000.000,00
	8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00
	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	230.000.000,00
	vi Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.004.967.335,00
	10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000,00

	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.000.000,00
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	348.967.335,00
	13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	265.000.000,00
	14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	220.000.000,00
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	755.000.000,00
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.115.000.000,00
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	682.000.000,00
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433.000.000,00
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	870.782.750,00
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510.900.000,00
	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.882.750,00
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00
II	PROGRAM PENGELOLAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL		351.350.000,00

	i	Kegiatan Pengelolaan ruang laut sampai Dengan 12 mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	315.000.000,00
	22	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	35.000.000,00
	23	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	280.000.000,00
	ii	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.350.000,00
	24	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	36.350.000,00
III		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.692.415.000,00
	i	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	700.000.000,00
	25	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	700.000.000,00
	ii	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.738.770.000,00
	26	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	38.770.000,00
	27	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.700.000.000,00

	iii	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	36.700.000,00
	28	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	36.700.000,00
	iii	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	216.945.000,00
	29	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	0,00
	30	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	216.945.000,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		4.094.264.000,00
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	28.200.000,00
	31	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan	0,00
	32	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	28.200.000,00
	i	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	220.000.000,00
	33	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	220.000.000,00
	34	Pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	0,00

		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.846.064.000,00
	35	Penyediaan prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000,00
	36	Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota	3.796.064.000,00
V	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		569.655.000,00
	i	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	535.905.000,00
	37	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan atau Usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan provinsi	112.000.000,00
	38	Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	423.905.000,00

		Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan Air lainnya yang dapat di usahakan lintas Kabuoaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	33.750.000,00
	39	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/ atau Usaha pengolahan hasil Perikanan sesuai kewenangan Provinsi	11.250.000,00
	40	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/ Atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa,dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	11.250.000,00
	41	Pengawasan Usaha pembudidayaan Ikan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	11.250.000,00
VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		1.388.106.000,00
	i	Kegiatan Penerbitan izin Usaha pemasaran dan Pengolahan Hasil perikanan Lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	170.000.000,00
	42	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor pengolahan ikan dan subsektor pemasaran ikanskala usaha menengah dan besar	170.000.000,00
	ii	Kegiatan Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	820.280.000,00
	43	Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	400.000.000,00

	44	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	420.280.000,00
		Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam (satu) daerah Provinsi	397.826.000,00
	45	Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ distribusi ikan lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	397.826.000,00
Jumlah : 34 kegiatan			33.347.338.085,00

3) Program dan Kegiatan APBN

Total pagu Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 139,068,000, namun pagu tersebut mengalami pemblokiran dikarenakan efisiensi anggaran sehingga kegiatan APBN tidak bisa dilaksanakan, adapun rincian anggaran terdiri atas:

No.	Unit Organisasi / Unit Kerja	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Pagu	Penyerapan (%)		Keterangan/Kendala dan Permasalahan
			Rupiah	S (%)	R (%)	
1	2	3	6	8	9	16
1	Sekretariat Jenderal	04 Ekonomi	0	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Setjen tidak ada anggaran program dukungan manajemen dari APBN. Dukungan manajemen ini termasuk honor validator dan enumerator statistik kabupaten/kota, sehingga tidak ada pembayaran honor selama tahun 2025.
	690935	04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	0	0,00	0,00	
		032.01.WA Program Dukungan	0	0,00	0,00	
		032.01.WA.2325 Pengelolaan dan BMN	0	0,00	0,00	
2	Ditjen Perikanan Budidaya	04 Ekonomi	0	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Perikanan Budidaya tidak ada anggaran pada tahun 2025.
	119142	04.03 Pertanian, Kehutanan, Kelautan	0	0,00	0,00	
		032.04.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	0	0,00	0,00	
		032.04.HB.7022 Pengelolaan Budidaya Ikan Air Payau	0	0,00	0,00	
3	Ditjen Pengawasan	04 Ekonomi	0	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak ada anggaran pada tahun 2025.
	Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	0	0,00	0,00	
	119038	032.05.HB Program	0	0,00	0,00	
		032.05.HB.2352 Pemantauan Daya Kelautan dan Perikanan	0	0,00	0,00	
4	Ditjen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	04 Ekonomi	0	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak ada anggaran program dukungan manajemen pada tahun 2025.
	690980	04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	0	0,00	0,00	
		032.05.WA Program Dukungan Manajemen	0	0,00	0,00	
		032.05.WA.2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0	0,00	0,00	
5	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	04 Ekonomi	139.068.000	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2025 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.139.068.000,- . Namun terdapat blokir /automatic adjusment senilai Rp. 139.068.000,-. sehingga tidak ada anggaran yang dapat digunakan sampai akhir tahun 2025.
	691018	04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	139.068.000	0,00	0,00	
		032.06.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	99.000.000	0,00	0,00	
		032.06.EC.2357 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	99.000.000	0,00	0,00	
		032.06.WA Program Dukungan Manajemen	40.068.000	0,00	0,00	
		032.06.WA.2361 Dukungan Manajemen Internal Lingkup	40.068.000	0,00	0,00	
		Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				
6	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	04 Ekonomi	0	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Penglolaan Kelautan dan Ruang Laut tidak ada anggaran program dukungan manajemen pada tahun 2025.
	691056	04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	0	0,00	0,00	
		032.07.WA Program Dukungan	0	0,00	0,00	
		032.07.WA.2367 Dukungan	0	0,00	0,00	
		Ditjen Pengelolaan Ruang Laut				
JUMLAH			139.068.000	0,00	0,00	

4. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

a) Kota Palembang

Terdapat 21 (dua puluh satu) kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 6) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 7) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 11) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- 12) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 13) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 14) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 15) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 18) Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau – Pulau Kecil
- 19) Peningkatan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas
- 20) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- 21) Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing

b) Kabupaten Ogan Komering Ilir

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kota Ogan Komering Ilir, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- 5) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

c) Ogan Komering Ulu

Sedangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu kegiatan yang berkaitan dengan kewilayahan diantaranya:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

d) Ogan Komering Ulu Timur

Di Kabupaten OKU Timur kegiatan kewilayahan ada 2 (Dua) antara lain:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

e) Kabupaten Pali

Di Kabupaten Pali ada 2 (Dua) kegiatan kewilayahan yakni:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas
- 5) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 6) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistic ikan Lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

f) Kabupaten Muara Enim

Kegiatan kewilayahan di Kabupaten Muara Emin diantaranya:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

g) Kabupaten Lahat

Kegiatan kewilayahan di Kabupaten Lahat ada 3 (tiga), kegiatan tersebut adalah:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka

menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

h) Kota Pagar Alam

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 5) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas

i) Kota Lubuk Linggau

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

j) Kabupaten Musi Rawas

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

k) Kabupaten Musi Rawas Utara

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
 - 5) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas
- l) Kabupaten Musi Banyuasin
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 4) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- m) Kabupaten Banyuasin
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan
 - 4) Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 5) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 6) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- n) Kabupaten Ogan Ilir
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 3) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
 - 5) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas
- o) Kabupaten Empat Lawang
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Pelaksanaan Bimbingan, fasilitasi Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- p) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 4) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- q) Kota Prabumulih
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 4) Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 000.7.2.8/0385/Bappeda-V/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Penyampaian Laporan hasil Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan IV ini pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN:

4) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	7
Total Belanja	33.347.338.085,00	31.929.249.038,00	100,00	95,74	100,00	100,00
Belanja Pegawai	16.777.800.000,00	16.125.669.255,00	100,00	96,11	100,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	16.009.655.335,00	15.255.064.455,00	100,00	95,29	100,00	100,00
Belanja Modal	559.882.750,00	545,515,328,00	100,00	97,43	100,00	100,00

5) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Unit Organisasi / Unit Kerja	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Pagu	Penyerapan (%)		Keterangan/Kendala dan Permasalahan
			Rupiah	S (%)	R (%)	
1	2	3	6	8	9	16
1	Sekretariat Jenderal	04 Ekonomi	0	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Setjen tidak ada anggaran program dukungan manajemen dari APBN. Dukungan manajemen ini termasuk honor validator dan enumerator statistik kabupaten/kota, sehingga tidak ada pembayaran honor selama tahun 2025.
	690935	04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	0	0,00	0,00	
		032.01.WA Program Dukungan	0	0,00	0,00	
		032.01.WA.2325 Pengelolaan dan BMN	0	0,00	0,00	
2	Ditjen Perikanan Budidaya	04 Ekonomi	0	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Perikanan Budidaya tidak ada anggaran pada tahun 2025.
	119142	04.03 Pertanian, Kehutanan, Kelautan	0	0,00	0,00	
		032.04.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	0	0,00	0,00	
		032.04.HB.7022 Pengelolaan Budidaya Ikan Air Payau	0	0,00	0,00	
3	Ditjen Pengawasan	04 Ekonomi	0	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak ada anggaran pada tahun 2025.
	Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	0	0,00	0,00	
	119038	032.05.HB Program	0	0,00	0,00	
		032.05.HB.2352 Pemantauan Daya Kelautan dan Perikanan	0	0,00	0,00	
4	Ditjen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	04 Ekonomi	0	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak ada anggaran program dukungan manajemen pada tahun 2025.
	690980	04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	0	0,00	0,00	
		032.05.WA Program Dukungan Manajemen	0	0,00	0,00	
		032.05.WA.2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup	0	0,00	0,00	
		Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
5	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	04 Ekonomi	139.068.000	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2025 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.139.068.000,- . Namun terdapat blokir /automatic adjusment senilai Rp. 139.068.000,-. sehingga tidak ada anggaran yang dapat digunakan sampai akhir tahun 2025.
	691018	04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	139.068.000	0,00	0,00	
		032.06.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	99.000.000	0,00	0,00	
		032.06.EC.2357 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	99.000.000	0,00	0,00	
		032.06.WA Program Dukungan Manajemen	40.068.000	0,00	0,00	
		032.06.WA.2361 Dukungan Manajemen Internal Lingkup	40.068.000	0,00	0,00	
		Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				
6	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	04 Ekonomi	0	0,00	0,00	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Penglolaan Kelautan dan Ruang Laut tidak ada anggaran program dukungan manajemen pada tahun 2025.
	691056	04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	0	0,00	0,00	
		032.07.WA Program Dukungan	0	0,00	0,00	
		032.07.WA.2367 Dukungan	0	0,00	0,00	
		Ditjen Pengelolaan Ruang Laut				
JUMLAH			139.068.000	0,00	0,00	

b. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

✓ Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi TW 3	Capaian
1	NTN	Ton	104,7	115,57	110,38 %
2	NTPi	Ton	94,5	93,15	98,57 %
3	Konsumsi ikan	Kg/kap/Tahun	44,5	30,76	69,12 % (Angka Sementara)

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025

b. Tindak Lanjut yang diperlukan

IV. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Dan APBN Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat menjadi acuan dan tolak ukur pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi program/kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sehingga akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**H. ARIES IRWAN WAHYU, S.STPi., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA / IV C
NIP. 19681120 198903 1 006**

Desamul